



IDN/ANTARA

TINGKAT KUNJUNGAN WISATA DI SOLO

Wisatawan berfoto dengan latar belakang Masjid Raya Sheikh Zayed di Solo, Jateng, Jumat (19/1). Menurut data Disparbud Kota Solo tingkat kunjungan wisatawan pada 2023 mencapai 5,5 juta orang atau naik dua kali lipat jika dibandingkan 2022 karena dipengaruhi dibukanya sejumlah destinasi wisata baru yang salah satunya Masjid Raya Sheikh Zayed dengan tingkat kunjungan sekitar 3 juta wisatawan sepanjang 2023.

Pemkot Serang Minta Pengusaha Tempat Hiburan Malam Legowo

Pemkot Serang sudah cukup memberikan toleransi kepada para pengusaha tempat hiburan malam. Karena, Pemerintah Daerah sudah memberikan waktu hingga akhir tahun 2023 untuk menutup usahanya secara mandiri, kata Asda I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Serang, Subagyo.

SERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang meminta agar pengusaha tempat hiburan malam legowo tempat hiburan malam legowo dengan keputusan yang sudah final. Sebab, Pemkot Serang menilai jika pihaknya sudah memberikan toleransi sebelumnya kepada para pengusaha tempat hiburan malam.

Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Serang, Subagyo, mengatakan bahwa pihaknya bersama para pengusaha

tempat hiburan malam itu sudah pernah melakukan audiensi beberapa kali pada tahun 2023.

"Pada tahun 2023 di bulan Agustus-September kita pernah melakukan audiensi juga, kita undang pengusaha-pengusaha hiburan," ujarnya, Jumat (19/1).

Subagyo menjelaskan, terdapat dua hal yang disoroti oleh pengusaha tempat hiburan malam tersebut. Salah satunya terkait aspek keadilan. Pasalnya, dalam Perda Pengelolaan Usaha Kepariwisata (PUK)

Pemkot Serang memperbolehkan hal tersebut, namun khusus untuk hotel berbintang lima.

"Silakan ada mekanisme dan jalur yang ditempuh oleh pengusaha dengan melakukan judicial review, silakan kalau memang dianggap Perda PUK tidak memenuhi unsur keadilan. Dulu kan sudah pernah melakukan (judicial review) tapi ditolak," jelasnya.

Subagyo mengaku, Pemkot Serang sudah cukup memberikan toleransi kepada para pengusaha tempat hiburan malam. Karena, Pemerintah Daerah sudah memberikan waktu hingga akhir tahun 2023 untuk menutup usahanya secara mandiri.

"Lalu yang kedua, mereka meminta waktu bahwa mereka punya anak buah, punya pekerja yang tentu harus dipikirkan bagaimana mereka pindah, harus dipersiapkan. Dan mereka meminta waktu sampai akhir tahun 2023, itu ke-

inginan mereka sendiri. Kita sudah cukup memberikan toleransi," ujarnya.

Sebelumnya, salah satu pengusaha hiburan malam di Kota Serang, Hendra, mengatakan bahwa pihaknya tetap akan mengikuti setiap keputusan yang diambil oleh Pemerintah Kota Serang.

"Kita akan mengikuti apa yang diputuskan oleh Pemerintah. Tapi saya lagi berupaya agar Pemerintah meninjau kembali terkait penertiban atau pembongkaran di wilayah Kota Serang," ujarnya Rabu (17/1).

Ia mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan gugatan uji materiil Perda PUK untuk legalitas izin usahanya.

"Kita ini yang berkumpul di asosiasi lagi gugat Perda PUK kemarin ke Mahkamah Agung (MA) terkait legalitas izin usahanya," katanya.

Dijelaskan dia, uji materiil tersebut akan dilakukan mulai pekan depan sebelum Pemkot Serang

melakukan penertiban atau pembongkaran tempat hiburan malam.

"Minggu depan kita akan melakukan gugatan ke MA. Tapi rencananya sudah lama, karena harus menyiapkan legal standingnya," jelasnya.

Selain itu, kata dia, Pemerintah seharusnya memperhatikan para pekerja yang mencari penghasilan di tempat hiburan malam.

"Pemerintah juga harus melihat karyawan-karyawan kita kalau usaha ini ditutup mau kerja ke mana? Itu yang harus dilihat oleh Pemerintah," katanya.

Akan tetapi, apabila uji materiil Perda PUK ditolak oleh MA, maka pihaknya secara legowo akan menutup usahanya tersebut.

"Tetapi kalau memang sudah ada hasil dari MK terkait gugatan kita, apa pun itu hasilnya kita akan ikuti semuanya. Kalau Pemerintah yang menang, kita akan tutup usaha kita juga," ujarnya. ● pra

BPBD Lebak Mulai Siaga Hadapi Bencana Hidrometeorologi

LEBAK (IM)- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Banten, siaga menghadapi bencana hidrometeorologi karena dua sampai tiga hari ke depan diprediksi curah hujan tinggi.

"Kami mengimbau warga yang tinggal di daerah rawan bencana alam tetap meningkatkan kewaspadaan bencana hidrometeorologi itu," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak, Febby Rizky Pratama di Lebak, Jumat (19/1).

BPBD Lebak hingga kini terus berkoordinasi dengan Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk informasi cuaca termasuk di dalamnya curah hujan. Selain itu, wilayah Kabupaten Lebak rawan bencana hidrometeorologi, seperti cuaca ekstrem yang ditandai hujan lebat, angin kencang, petir, tanah longsor, pergerakan tanah, gelombang tinggi, banjir, dan banjir bandang.

"BPBD Lebak mengeluarkan peringatan dini guna mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa," katanya.

Ia mengatakan wilayah Kabupaten Lebak masuk daerah langganan bencana hidrometeorologi, karena topografi alamnya pegunungan, perbukitan, aliran sungai dan pesisir pantai.

Oleh karena itu, pihaknya meminta aparatur kecamatan, kelurahan/desa dan masyarakat yang tinggal di lokasi rawan bencana agar meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi

puncak curah hujan tinggi.

Untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi, pihaknya menyosialisasikan dan edukasi pencegahan bencana alam kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pegunungan, perbukitan dan daerah aliran sungai serta kawasan hutan.

Selain itu juga pihaknya mengingatkan warga pesisir dan nelayan Lebak yang berhadapan dengan Perairan Selatan Banten dan Samudera Hindia, karena tinggi gelombang mencapai 4,00 meter dan tiupan angin cukup kencang dari arah barat daya. "Kami minta masyarakat pesisir dan nelayan waspada gelombang tinggi itu agar terhindar dari kecelakaan laut," katanya menjelaskan.

Menurut dia, pihaknya kini mempersiapkan peralatan evakuasi dengan kondisi baik dan dapat dioperasikan jika sewaktu-waktu terjadi bencana hidrometeorologi, seperti kendaraan operasional, perahu karet, tambang, mesin penyedot air, tenda dan lainnya.

Selain itu juga menyediakan logistik dan mencukupi untuk kebutuhan konsumsi tiga bulan ke depan dan menyiapkan obat-obatan.

"Kami memperkuat jaringan dan koordinasi untuk menangani setelah bencana agar bisa ditangani dengan baik dan menerima pelayanan dasar sehingga tidak menimbulkan kelaparan dan penyakit menular," katanya menjelaskan. ● pra

Pemkot Serang Targetkan Penanaman Bawang Merah Seluas 50 Hektare

SERANG (IM)- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, menargetkan penanaman bawang merah dapat mencapai 50 hektare untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang, Sony August di Serang, Banten, Jumat (19/1), mengatakan sedang melakukan pemetaan dan melihat lahan sawah yang sudah tidak produktif untuk ditanami bawang.

"Sebenarnya kami sedang melakukan pemetaan, kami sedang melihat kondisinya apakah ada lahan sawah yang dimungkinkan untuk ditanami bawang lagi, karena kami ingin lebih dari 12 hektare, kami targetkan 50 hektare," katanya.

Ia mengatakan, jika tahun ini bisa memiliki 50 hektare lahan tanaman bawang merah

maka dapat menghasilkan panen sekitar 50 ton bawang merah. Jika dalam tiga bulan produksi, dalam satu tahun bisa empat kali panen dengan perolehan sekitar 200 ton, sehingga dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Serang.

"Penanaman bawang merah ini di Kecamatan Kasemen ini dapat dikembangkan, sehingga produksi melimpah dan dapat mencukupi kebutuhan masyarakat Kota Serang," katanya.

Selain itu, ia juga menyampaikan Pemkot Serang dalam beberapa waktu ke depan akan terus mengusahakan untuk menanam beberapa jenis tumbuhan lainnya yang bisa dilakukan penanaman guna menangani inflasi.

"Ke depan kami juga berupaya menanam beberapa jenis tumbuhan lainnya, tidak hanya bawang merah untuk menangani inflasi," katanya.

Ia mengatakan, untuk saat ini hasil panen bawang merah baru sebanyak tujuh ton di lahan seluas tujuh hektare di Kelurahan Sawah Luruh, Kasemen, Kota Serang, yang dikembangkan oleh kelompok tani.

Sementara itu, Ahmad Ropasi, ketua Kelompok Tani, Sumber Jaya, Kelurahan Sawah Luruh, Kasemen mengatakan bawang merah yang ditanam merupakan bawang merah jenis Bima Brebes yang kualitasnya bagus. "Jenis bawang yang ditanam ini merupakan jenis bawang Bima Brebes, ini bawang yang bagus di pasar," katanya.

Harga dari petani bawang Kota Serang berkisar Rp20 ribu hingga Rp35 ribu per kilogram. "Kalau di pasaran tergantung varietas bawangnya, kalau varietas bawang dari Jawa Timur itu terbilang rendah dibanding bawang dari Brebes," katanya. ● pra



IDN/ANTARA

DAMPAK ANGIN KENCANG DI BONDOWOSO

Sejumlah warga berada di depan rumah yang rusak akibat bencana angin kencang di Desa Walidono, Prajekan, Bondowoso, Jatim, Jumat (19/1). Hujan disertai angin kencang di wilayah tersebut terjadi Kamis (18/1), mengakibatkan 202 rumah dan masjid rusak di dua desa, yaitu Walidono dan Cangkring,

Tanah Longsor di Cilegon, 2 Warga Terluka

CILEGON (IM)- Hujan deras disertai angin yang melanda Cilegon, Banten, menyebabkan pohon tumbang hingga tanah longsor. Sebanyak dua orang mengalami luka-luka akibat tanah longsor.

Peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulomerak, Cilegon, sekitar pukul 08.00 WIB pagi tadi. Satu rumah yang dihuni tiga kepala keluarga terdampak longsor. "Pagi pas hujan ada info tanah longsor itu dihuni oleh 3 KK 9 jiwa dan ada 2 orang luka dan dibawa ke rumah sakit di RSKM dan di Pulomerak," kata Kepala BPBD Cilegon, Suhendi saat dikonfirmasi, Jumat (19/1).

Kini korban luka-luka sudah mendapat penanganan

medis di rumah sakit dan Puskesmas Pulomerak. Petugas BPBD Cilegon dibantu warga sekitar untuk melakukan pembersihan puing-puing akibat longsor tersebut. "Yang luka-luka sudah ditangani di rumah sakit. Sekarang masih bersih-bersih di rumah yang kena longsor," ucapnya.

Selain tanah longsor, ada dua pohon tumbang di jalan protokol Cilegon. Pohon tumbang itu sempat mengganggu arus lalu lintas. Namun, petugas BPBD sudah melakukan evakuasi terhadap pohon tumbang itu.

"Tadi pagi sekitar jam 7-an ada pohon tumbang di depan makam Ngabei dan Gerem. Sekarang sudah tertangani," imbuhnya. ● pra

Langganan Banjir, Warga Cibeber Minta Kali Dikeruk

CILEGON (IM)- Sejumlah warga RT 4 RW 2, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon mengeluhkan banjir yang melanda setiap kali hujan tiba. Dengan kondisi tersebut warga meminta agar kali Cibeber Barat dikeruk atau dinormalisasi.

Pantauan di lokasi pada Jumat (19/1), setidaknya ada lima rumah di RT 4 RW 2, Kelurahan Cibeber yang tergenang air setinggi 30 senti meter akibat curah hujan yang melanda di wilayah Kota Cilegon sejak malam hingga siang.

Salah seorang warga yang terdampak, Safilah mengaku air masuk ke dalam rumah sekira jam tujuh pagi, ia pun pasrah dengan kondisi tersebut karena sudah menjadi langganan setiap hujan tiba.

"Banjir sudah masuk ke rumah jam tujuhan, hampir semuanya terendam banjir sampe ke kamar-kamar, juga," keluh Safilah saat ditemui di rumahnya, Jumat.

Kata Sufilah, air yang merendam rumahnya akibat dari luapan kali yang berada tidak jauh dari kediamannya. Dia pun meminta

agar pemerintah mengeruk kali atau menormalisasi kali tersebut.

"Banjir ini sudah lama terjadi, karena selama ini belum ada perbaikan dari kali ini. Makanya, saya minta pemerintah agar mengeruk segera kali di Cibeber Barat ini," pintanya.

Karena selama ini, penanganan banjir di wilayah tersebut baru hanya membangun gorong-gorong dan resapan yang berada di sekitar rumah warga. Namun hingga saat ini upaya tersebut belum efektif karena masih terjadi banjir di wilayahnya.

"Saya minta kali dikeruk, karena pembangunan gorong-gorong dan resapan ini belum efektif menampung luapan air dari kali itu," katanya.

Senada dengan itu, warga lainnya yang juga terdampak banjir, Idawati berharap, pemerintah segera memberi solusi sehingga banjir ini tidak lagi terjadi di wilayahnya.

"Kalau menurut saya mah kali ini segera dikeruk karena banjir ini masih saja terjadi," tutupnya.

Terpisah, menanggapi hal tersebut. ● pra



IDN/ANTARA

KATARAK PENYEBAB KEBUTAAN TERTINGGI DI NTB

Petugas medis melakukan tes penglihatan pasien katarak sebelum dilakukan operasi katarak di RS Mata Prov. NTB di Mataram, Jumat (19/1). Menurut data RS Mata Prov. NTB, kasus kebutaan di NTB menduduki posisi kedua setelah Jatim, dengan persentase 4 persen penyebabnya dari penyakit katarak.

Bawaslul Pandeglang Waspadaai Politik Uang Berkedok Transportasi Kampanye

PANDEGLANG (IM)- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pandeglang mewaspadaai praktik politik uang dengan modus pemberian uang transportasi kepada simpatisan dan pendukung, terutama dalam kampanye akbar.

Koordinator Divisi Hukum dan Sengketa Bawaslu Pandeglang, Iman Ruhmawan menyatakan, kekhawatiran terkait dengan resiko money politics yang mungkin terjadi dalam pemberian uang transportasi pada kampanye rapat umum.

"Kampanye rapat umum rentan terhadap politik uang melalui pemberian uang transportasi. Ini memang merupakan potensi resiko yang perlu diwaspadai," ungkapnya, Jumat (19/1).

Iman Ruhmawan mengatakan, sesuai dengan aturan regulasi yang berlaku, Bawaslu memantau bahwa dalam hal transportasi, tidak diberikan uang sebagai pengganti, melainkan dalam bentuk bahan bakar minyak (BBM) ketika peserta pemilu ikut berkampanye atau peserta kampanye akan hadir.

Iman menjelaskan, terkait dengan politik uang berkedok pemberian uang transportasi, Bawaslu Pandeglang berencana untuk mengirim surat kepada Komisi

Pemilihan Umum (KPU) agar kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

"Kami akan mengirim surat kepada KPU untuk memastikan bahwa kampanye rapat umum dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Kami juga mengingatkan partai politik peserta Pemilu untuk menaati regulasi terkait biaya transportasi," jelasnya.

Menurutnya, pemberian uang transportasi dalam kampanye Pemilu dilarang. Hal ini tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Politik uang dalam kampanye yang digelar peserta pemilu memiliki ruang yang besar untuk dilakukan. Terlebih pada detik-detik menjelang pencoblosan.

Ia menambahkan, untuk pemilihan umum (Pemilu) 2024 Bawaslu Pandeglang terus berupaya agar tidak terjadi praktik money politik atau modus politik uang tersebut di Kabupaten Pandeglang.

Dia berharap peran dari masyarakat untuk mengawasi jalannya kampanye pemilu.

"Ya sebagaimana tagline dari Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu," pungkasnya. ● pra